

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dalam Mendukung Ketahanan Pangan Kabupaten Jeneponto

Institutional Capacity Building in Supporting Food Security Jeneponto Regency

Rasdiana Mudatsir*, Asriyanti Syarif

*) Email korespondensi: rasdianamudatsir@unismuh.ac.id
Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jl. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia.

ABSTRAK

Penguatan kelembagaan petani menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui peran kelembagaan pertanian dalam mendukung program ketahanan pangan Nasional di Kabupaten Jeneponto; (2) mengetahui strategi yang perlu dilaksanakan dalam penguatan kelembagaan petani untuk mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini didesain dengan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis data SWOT. Informan yang digunakan dari penelitian ini petani yang menjadi pengurus atau anggota kelompok, penyuluh pertanian serta lembaga penunjang dalam kegiatan pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor yang berperan dalam pengembangan sistem ketahanan pangan adalah petani yang menjadi anggota kelompok tani, penyuluh pertanian serta pedagang. Strategi yang perlu diterapkan dalam penguatan kelembagaan petani adalah memperbaiki administrasi dalam kelompok tani, meningkatkan partisipasi petani agar menjadi kelompok tani yang mandiri, dukungan pemerintah dalam pendirian kelembagaan ekonomi petani, pembentukan penyuluh pertanian swadaya, meningkatkan peran kelompok tani dalam pemanfaatan teknologi modern untuk menambah nilai tambah produk yang dihasilkan, meningkatkan posisi tawar petani dalam tata niaga produk pertanian.

Kata kunci: kapasitas kelembagaan; ketahanan pangan; kelompok tani; penyuluh pertanian; kemandirian petani.

ABSTRACT

Strengthening farmer institutions is one of the government's efforts to improve farmer welfare. This research aims to: (1) determine the role of agricultural institutions in supporting the National food security program in Jeneponto Regency; and (2) determine the strategies that need to be implemented in strengthening farmer institutions to support food security programs in Jeneponto Regency. This research was designed with a qualitative approach and analyzed using the SWOT data analysis technique. The informants used in this research came from administrators and members of farmer groups, Agricultural Extension Centers, community leaders, and supporting institutions in agricultural activities. The research results show that the actors who play a role in developing a food security system are farmers who are members of farmer groups, agricultural instructors, and traders. The strategies that need to be implemented in strengthening farmer institutions are improving administration in farmer groups, increasing farmer participation to become independent farmer groups, government support in establishing farmer economic institutions, forming independent agricultural extension workers, increasing the role of farmer groups in using modern technology to add added value. The products produced increase farmers' bargaining position in the agricultural product trade system.

Keywords: *institutional capacity; food security; farmer groups; agricultural instructor; farmer independence.*

I. PENDAHULUAN

Persoalan pangan dapat dikatakan rumit dan sangat kompleks, mulai dari hulu sampai ke hilir dan melibatkan berbagai sektor karena pangan merupakan hajat hidup orang banyak dan merupakan kebutuhan primer setiap manusia sehingga memerlukan lembaga dengan kewenangan yang memadai (Aziza, 2019; Backhe et al., 2019). Berbagai usaha pemerintah untuk mencapai swasembada pangan nasional telah dilakukan dengan cara subsidi harga dasar produk pertanian, subsidi pupuk dan faktor input produksi lainnya, pembangunan infrastruktur irigasi serta sarana transportasi. Kegiatan penelitian dan pengembangan penyuluhan juga terus dilakukan untuk mendorong penguatan ketahanan pangan nasional (Aldillah, 2018; Haug et al, 2021).

Kelembagaan pertanian dan sistem agribisnis mempunyai peranan yang besar dalam menunjang terwujudnya ketahanan pangan (Tan et al., 2021; Pakenan et al., 2017). Kesadaran yang perlu dibangun pada tingkat petani adalah kesadaran berkelompok yang tumbuh atas dasar kebutuhan. Kelembagaan pertanian dalam pengembangannya perlu diarahkan menjadi kelembagaan ekonomi dengan tujuan meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, serta meningkatkan posisi dan kekuatan tawar petani (Kelly et al., 2018; Prager, 2022).

Permasalahan yang dihadapi petani pada umumnya adalah lemah dalam hal permodalan, akibatnya tingkat penggunaan saprodi rendah sehingga produk yang dihasilkan petani relatif berkualitas rendah. Pada umumnya budaya petani di pedesaan dalam melakukan praktik pertanian masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan keluarga (subsistem), dan belum berorientasi pasar (Agus *et al.*, 2019; Prasetyo dan Ekowati, 2013). Selain masalah internal petani, ketersediaan faktor pendukung seperti infrastruktur, lembaga ekonomi pedesaan, intensitas penyuluhan, dan kebijakan pemerintah sangat diperlukan, guna mendorong usaha tani dan meningkatkan akses petani terhadap pasar (Ruhimat, 2015).

Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani yang telah ada, belum berjalan secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan upaya pengembangan pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani (Hermanto dan Swastika, 2011). Peran kelembagaan petani dalam mendukung keberlanjutan pertanian sangat diperlukan untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi pelaku pembangunan dalam rangka pembangunan ekonomi lokal (Yu and Wu, 2018).

Permasalahan yang terdapat dalam kelembagaan petani di Kabupaten Jeneponto adalah pada umumnya peran kelembagaan petani tidak berjalan dengan baik disebabkan karena kelembagaan petani pada umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk memudahkan pengkoordinasian apabila ada kegiatan atau program pemerintah, sehingga lebih bersifat orientasi program, dan kurang menjamin kemandirian kelompok dan keberlanjutan kelompok. Meningkatnya peran dan partisipasi petani untuk mendukung pemberdayaan dan peran kelembagaan pertanian, salah satunya tercermin pada meningkatnya produksi dan produktivitas usahatani dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan dan sangat mempengaruhi pendapatan petani; dimana ketahanan pangan berkelanjutan menjadi salah satu tujuan program pembangunan berkelanjutan.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: (1) mengetahui peran kelembagaan

pertanian dalam mendukung program ketahanan pangan Nasional di Kabupaten Jeneponto; (2) mengetahui strategi yang perlu dilaksanakan dalam penguatan kelembagaan petani untuk mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Jeneponto.

II. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Pa'rasangang Beru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan pada Januari 2023 sampai Maret 2023. Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota kelompok tani, penyuluh pertanian, serta lembaga pendukung yang ada di Kecamatan Turatea. Untuk merumuskan strategi penguatan kelembagaan, digunakan analisis SWOT.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kelembagaan Pertanian dalam Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional

Kelembagaan yang terkait dengan ketahanan pangan di setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan kebijakan pemerintah daerah dalam mengapresiasi kelembagaan pangan. Pada Tabel 1 memperlihatkan beberapa kelembagaan yang berperan dalam mendukung ketahanan pangan.

2. Strategi Penguatan Kelembagaan Petani untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan

Menganalisis lingkungan internal (*Internal Factors Analysis Summary*) untuk mengetahui berbagai kemungkinan kekuatan dan kelemahan. Menganalisis lingkungan eksternal (*External Factors Analysis Summary*) untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang dan ancaman.

a) *Internal Factors Analysis Summary (IFAS)*

Matriks ini dibuat untuk menentukan bobot dan rating mengenai faktor-faktor kekuatan dan kelemahan yang berada pada strategi internal. Pada faktor internal pada kekuatan, rating tertinggi bernilai 4 dan yang terendah bernilai 1. Sedangkan pada faktor internal (kelemahan) nilai terbesar adalah 1 dan yang terendah adalah 4. Adapun matriks IFAS (*Internal Factor Analysis System*) terdapat pada Tabel 2.

Matriks IFAS menunjukkan pada kekuatan memiliki nilai 1,74 sedangkan pada kelemahan memiliki nilai 0,34 menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh kelembagaan petani lebih besar dibandingkan dengan kelemahan. Total IFAS memiliki nilai 2,08 menunjukkan bahwa kondisi internal kelompok tani berada dalam kategori rata-rata karena berada pada selang nilai antara 2,00-3,00. Faktor kekuatan yang dimiliki besar karena adanya hubungan kekerabatan antara ketua dan anggota dalam kelompok tani. Selain itu, petani sangat aktif mencari informasi untuk kegiatan usahatani. Informasi yang diperoleh oleh petani berasal media elektronik dengan membaca berita di internet ataupun menonton video di youtube. Selain itu petani memperoleh informasi melalui kehadiran dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Informasi yang didapatkan

oleh ketua kelompok akan disampaikan kepada anggota. Keaktifan ketua kelompok mencari informasi akan adanya program bantuan pemerintah memudahkan kelompok tani dalam memperoleh bantuan sarana produksi berupa benih, pupuk cair, serta mesin pertanian yang dapat dimanfaatkan oleh anggota kelompok.

Tabel 1. Peran kelembagaan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Jeneponto.

No	Kelembagaan	Peran
1	Kelembagaan Petani	Kelembagaan petani sebagai wadah bagi petani dalam meningkatkan produktivitas pangan. Dalam upaya meningkatkan pembangunan ketahanan pangan, peranan kelembagaan petani di pedesaan sangat besar dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program yang sedang dan akan dilaksanakan serta mendapatkan bimbingan dalam meningkatkan produktivitas pangan.
2	Kelembagaan Sarana Produksi	Kelembagaan ini memberikan kontribusi dalam pengadaan sarana produksi yang dibutuhkan oleh petani dalam kegiatan usahatani berupa benih dan pestisida. Serta kelembagaan ini memiliki peran dalam menyalurkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Setiap desa ada yang menjadi penanggung jawab dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang telah ditunjuk oleh mitra yang telah bekerjasama dengan pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
3	Kelembagaan Alat dan Mesin Pertanian	Kelembagaan jasa alat mesin pertanian (alsintan) memberikan pelayanan jasa penyewaan alsintan yang berupa mesin panen padi (<i>combine harvester</i>) sehingga memudahkan petani dalam kegiatan panen.
4	Kelembagaan Penyuluhan	Lembaga penyuluhan berperan dalam melakukan kegiatan pendampingan pada petani, sehingga dituntut memiliki pengetahuan, informasi yang memadai untuk petani dan kemampuan untuk akses dan tanggap terhadap perkembangan teknologi .
5	Kelembagaan Permodalan	Lembaga yang memberikan bantuan permodalan kepada petani adalah pedagang tengkulak. Ada beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh pedagang tengkulak yaitu petani harus menjual hasil panen kepada pedagang tengkulak dan harga beli yang ditetapkan oleh pedagang biasanya lebih murah dibandingkan harga di pasaran.
6	Kelembagaan Pemasaran Hasil Pertanian	Kelembagaan pemasaran hasil pertanian berperan dalam membeli hasil panen petani. Kelembagaan pemasaran terdapat di tingkat desa sampai kabupaten. Kelembagaan pemasaran jagung memudahkan petani dalam proses pemasaran karena mereka langsung datang ke rumah petani untuk membeli jagung dalam keadaan belum dipipil. Sehingga petani tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi untuk menjual hasil panen di Lembaga pemasaran yang terdapat di kota.

Tabel 2. Matriks faktor strategi internal penguatan kelembagaan petani dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Jeneponto.

Faktor-faktor strategi eksternal	Bobot	Rating	Skor
Kekuatan			
1. Petani lebih aktif dalam mengakses informasi	0,10	3	0,30
2. Terjalannya kerjasama antar petani	0,14	4	0,56
3. Tersedianya sarana produksi pada kelompok tani	0,07	2	0,14
4. Petani aktif menghadiri kegiatan penyuluhan	0,07	2	0,14
5. Kemampuan menyebarkan inovasi	0,10	3	0,30
6. Ketua dan anggota kelompok memiliki hubungan kekerabatan	0,10	3	0,30
Sub Total	0,58	17	1,74
Kelemahan			
1. Intensitas pertemuan kelompok yang terbatas	0,07	2	0,14
2. Keterbatasan modal petani	0,07	2	0,14
3. Minimnya peran petani dalam kepengurusan kelompok tani	0,07	2	0,14
4. Tidak adanya kegiatan pengolahan hasil pertanian yang dilakukan oleh petani.	0,03	1	0,03
5. Kelompok tani didirikan hanya untuk mendapatkan bantuan pemerintah.	0,07	2	0,14
6. Kelas kelompok tani lebih didominasi oleh kelas pemula dan non kelas.	0,07	2	0,14
7. Belum terdapat program kelompok yang menjadikan kelompok menjadi mandiri.	0,03	1	0,03
Sub Total	0,42	12	0,34
Total	1,00	29	2,08

Kelemahan dalam faktor internal pada kelembagaan petani adalah kelompok tani yang didirikan hanya untuk mendapatkan bantuan pemerintah sehingga menyebabkan banyak anggota kelompok yang tidak menjalankan perannya dalam pengembangan kelompok tani. Kegiatan pertemuan dilakukan apabila ada sosialisasi tentang bantuan pemerintah. Kelompok tani tidak berfungsi sebagai unit usaha yang dapat meningkatkan pendapatan petani melalui kegiatan pengolahan hasil pertanian. Setelah panen petani langsung menjual hasilnya tanpa melakukan kegiatan pengolahan dengan alasan mereka harus membayar utang kepada pedagang yang memberi pinjaman modal dalam kegiatan usahatani. Selain itu, sebagian besar hasil panen padi yang diperoleh petani digunakan untuk kegiatan pesta pernikahan. Petani perlu didorong untuk terlibat dalam penetapan tujuan bersama, perencanaan kegiatan dan pelaksanaan kegiatan kelompok untuk berkolaborasi pada pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan persepsi mereka tentang prioritas lingkungan dan menguntungkan terhadap kegiatan usahatani mereka, sehingga akan menjadikan kelompok tani menjadi mandiri (Babu et al., 2016; Rustandi et al., 2020; Eastwood et al., 2019)

b) External Factors Analysis Summary (EFAS)

Matriks ini dibuat untuk menentukan bobot dan rating mengenai faktor-faktor peluang dan ancaman yang berada pada strategi eksternal. Pada faktor eksternal (Peluang) rating tertinggi bernilai 4 dan yang terendah bernilai 1, sedangkan pada faktor internal (ancaman)

nilai terbesar adalah 1 dan yang terendah adalah 4. Matriks EFAS (*External Factor Analysis system*) terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks faktor strategi eksternal penguatan kelembagaan petani dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Jeneponto.

Faktor-faktor strategi eksternal	Bobot	Rating	Skor
Peluang			
1. Bermitra dengan pedagang	0,09	2	0,18
2. Memperoleh bantuan pemerintah	0,09	2	0,18
3. Pemanfaatan teknologi modern	0,14	3	0,42
4. Peran KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) dalam mengembangkan potensi pertanian.	0,09	2	0,18
5. Petani dilibatkan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang)	0,14	3	0,42
6. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan kelembagaan petani	0,14	3	0,42
Sub Total	0,69	15	1,8
Ancaman			
1) Terbatasnya jumlah penyuluh	0,04	1	0,04
2) Kesulitan dalam memperoleh pupuk	0,04	1	0,04
3) Penetapan harga komoditi secara sepihak	0,04	1	0,04
4) Penyaluran program pemerintah yang tidak merata	0,04	1	0,04
5) Tidak terdapatnya lembaga keuangan desa yang mendukung dalam pemenuhan kredit bagi petani.	0,04	1	0,04
6) Sinergitas antar lembaga masih lemah	0,09	2	0,18
Sub Total	0,31	7	0,38
Total	1	22	2,18

Matriks EFAS menunjukkan pada peluang memiliki nilai 1,8 sedangkan pada ancaman memiliki nilai 0,38 menunjukkan bahwa peluang yang dimiliki oleh kelembagaan petani lebih besar dibandingkan dengan ancaman. Total EFAS memiliki nilai 2,18 menunjukkan bahwa kondisi eksternal kelompok tani berada dalam kategori rata-rata karena berada pada selang nilai antara 2,00 - 3,00. Faktor peluang yang dimiliki besar karena kelompok tani melakukan kerjasama dengan pedagang sarana produksi dan pedagang hasil bumi yang dapat menunjang kegiatan kelompok tani. Keterlibatan pihak swasta dalam mendukung kelembagaan petani umumnya bersifat tidak langsung. Sektor swasta terutama berfungsi sebagai saluran untuk arus material dan informasi. Sektor swasta berperan dalam menjual sarana produksi berupa pestisida, pupuk, benih tanaman yang dibutuhkan petani dan membeli hasil panen petani sehingga memainkan peran kunci dalam penawaran dan pemasaran.

Kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan melibatkan petani dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) untuk menyampaikan hal-hal yang diperlukan petani untuk ditetapkan sebuah program dengan memberikan bantuan kepada petani melalui Aparatur Desa dan Dinas Pertanian berupa pendampingan maupun bantuan fisik seperti sarana produksi pertanian yang menunjang kegiatan kelompok tani hal ini diharapkan dapat membantu kelompok tani agar menjadi lebih berkembang dengan baik.

Peluang dalam memperoleh bantuan pemerintah cukup besar, hal ini dapat diperoleh dengan persyaratan administrasi yang mendukung serta keaktifan kelompok tetap berjalan dengan baik secara konsisten.

Faktor yang menjadi ancaman dalam penguatan kapasitas kelembagaan petani dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Jeneponto adalah penyaluran bantuan pemerintah yang tidak merata menjadi salah satu alasan banyaknya kelompok tani yang tidak berjalan sesuai fungsinya. Kelompok tersebut berfungsi ketika ada bantuan yang disalurkan oleh pemerintah dan setelah itu tidak ada lagi kegiatan yang berlangsung dalam kelompok tani. Selain itu, yang menjadi ancaman dalam kelembagaan petani saat ini adalah terbatasnya jumlah penyuluh di setiap desa sehingga peran penyuluh tidak berjalan secara optimal. Banyak petani yang terlambat mendapatkan kartu tani dan terdaftar pada sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagai syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Lembaga keuangan desa yang tidak tersedia menjadi salah satu permasalahan bagi petani untuk memperoleh kredit usahatani. Selain itu, kurangnya pengawasan dari dinas pertanian dan dinas perdagangan terhadap harga jual komoditas tanaman pangan menyebabkan harga di pasaran tidak menentu dan ditentukan secara sepihak oleh pedagang yang berada di desa.

c) Internal-Eksternal (IE)

Matriks IE merupakan matriks yang dibuat dengan melihat kekuatan internal yang diperoleh dari analisis faktor Internal (IFAS) dan analisis faktor Eksternal (EFAS), sehingga diperoleh nilai titik temu antara faktor internal dan eksternal yang menentukan posisi kelembagaan yang ada di Kabupaten Jeneponto dan strategi apa yang ditempuh untuk memperkuat dari hasil analisis yang diperoleh. Adapun matriks IE tentang kelembagaan petani di Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Posisi kelembagaan petani di Kabupaten Jeneponto pada matriks internal-eksternal.

Kekuatan Internal	Kekuatan Eksternal		
	Tinggi	Rata-Rata	Lemah
Tinggi	1 GROWTH Konsentrasi melalui Integrasi vertikal	2 GROWTH Konsentrasi melalui Integrasi horizontal	3 RETRENCHMENT <i>Turnaround</i>
Sedang	4 STABILITY Hati-hati	5 GROWTHS Konsentrasi melalui integrasi horizontal STABILITY Tidak ada perubahan profit strategi	6 RETRENCHMENT <i>Divestment</i>
Rendah	7 GROWTH Diversifikasi Konsentrik	8 GROWTH Diversifikasi Konglomerat	9 RETRENCHMENT Bangkrut atau likuidasi

Tabel 5. Matrik analisis SWOT perumusan alternatif strategi penguatan kelembagaan petani dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Jenepono.

Faktor Internal	Strength (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petani lebih aktif dalam mengakses informasi. 2. Terjalannya kerjasama antar petani. 3. Tersedianya sarana produksi pada kelompok tani. 4. Petani aktif menghadiri kegiatan penyuluhan. 5. Kemampuan menyebarkan inovasi. 6. Ketua dan anggota kelompok memiliki hubungan kekerabatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensitas pertemuan kelompok yang terbatas 2. Keterbatasan modal petani. 3. Minimnya peran petani dalam kepengurusan kelompok tani. 4. Tidak adanya kegiatan pengolahan hasil pertanian yang dilakukan oleh petani. 5. Kelompok tani didirikan hanya untuk mendapatkan bantuan pemerintah. 6. Kelas kelompok tani lebih didominasi oleh kelas pemula dan non kelas. 7. Belum terdapat program kelompok yang menjadikan kelompok menjadi mandiri.
Faktor eksternal		
Opportunities (O)	Strategi SO	Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bermitra dengan pedagang. 2. Memperoleh bantuan pemerintah. 3. Pemanfaatan teknologi modern. 4. Peran KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) dalam mengembangkan potensi pertanian. 5. Petani dilibatkan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang). 6. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan kelembagaan petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki administrasi dalam kelompok untuk memperoleh dukungan atau bantuan pemerintah. 2. Meningkatkan peran-serta aktif kelompok tani dalam pemanfaatan teknologi modern. 3. Meningkatkan koordinasi dengan <i>Stakeholder</i> yang terkait dengan petani dan menjalin hubungan baik dengan mitra petani 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan partisipasi petani agar menjadi kelompok tani yang mandiri. 2. Dukungan pemerintah dalam pendirian kelembagaan ekonomi petani (KEP) di tingkat desa. 3. Pemanfaatan teknologi modern sebagai langkah untuk menambah nilai tambah produk yang dihasilkan
Threats (T)	Strategi ST	Strategi WT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya jumlah penyuluh. 2. Kesulitan dalam memperoleh pupuk. 3. Penetapan harga komoditi secara sepihak. 4. Penyaluran program pemerintah yang tidak merata. 5. Tidak terdapatnya lembaga keuangan desa yang mendukung dalam pemenuhan kredit bagi petani. 6. Sinergitas antar lembaga masih lemah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan penyuluh pertanian swadaya di tingkat desa. 2. Pelatihan dan pendidikan kepada anggota untuk penggunaan teknologi informasi 3. Pembentukan kerjasama antara petani dengan Lembaga keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan kelembagaan dilakukan secara partisipatif 2. Mendirikan koperasi sebagai wadah untuk kemandirian kelompok, pengembangan dan pengelolaan hasil pertanian. 3. Meningkatkan posisi tawar petani dalam tata niaga produk pertanian.

Berdasarkan hasil dari Matriks IE, kekuatan dan kelemahan yang merupakan faktor Internal berada pada nilai 2,08 artinya posisi dari kekuatan internal berada pada posisi rata-

rata, sedangkan peluang dan ancaman yang merupakan faktor eksternal berada pada nilai 2,18 artinya posisi kekuatan eksternal berada pada posisi sedang. Sehingga pada matriks IE berada pada kuadran 5 yang merupakan kondisi pertumbuhan (*growths*) atau konsentrasi melalui integrasi horizontal dan tidak adanya perubahan profit strategi (*Stability*).

3. Alternatif Strategi Penguatan Kelembagaan Petani untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan

Berdasarkan hasil analisis SWOT dalam mengelola kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman yang dihadapi kelompok tani maka diperoleh enam alternatif strategi yang dapat dilakukan oleh kelompok tani dalam usaha penguatan kelompok tani untuk mendukung program ketahanan pangan yaitu tiga strategi SO, tiga strategi WO, tiga strategi ST, dan tiga strategi WT. Hasil analisis SWOT dalam merumuskan alternatif strategi penguatan kelompok tani untuk mendukung program ketahanan pangan disajikan pada Tabel 5.

Strategi tersebut berdasarkan kekuatan dan peluang yaitu, perbaikan administrasi kelompok untuk mendapatkan dukungan pemerintah, meningkatkan peran aktif anggota kelompok dalam pemanfaatan teknologi, serta pengkoordinasian antar lembaga untuk menjalin kemitraan. Administrasi tentunya sebagai bagian praktik pemerintahan (Dwiyanto, 2021), di mana akan memberikan manfaat positif berupa dukungan kebijakan dari pemerintah (Winarta dkk, 2020).

Sebagai upaya memanfaatkan peluang agar kelemahan dapat taratasi maka partisipasi petani harus mandiri, utamanya peningkatan ekonomi petani serta pemanfaatan teknologi modern untuk menambah nilai produk. Pemberdayaan seharusnya dapat memandirikan petani melalui modernisasi (Sadono, 2008), serta partisipasi sesama petani yang mampu mengakses pemanfaatan teknologi (Anwaruddin, 2020). Modernisasi ditentukan oleh percepatan kemandirian dan partisipasi petani melalui ekonomi organisasi yang mandiri (Lestari, 2020).

Tenaga penyuluh menjadi kekuatan namun juga tantangan dalam percepatan adopsi teknologi modern, maka penting tersedianya penyuluh swadaya yang berperan melatih serta mendidik penggunaan teknologi dan menginisiasi kerjasama antar lembaga. Pembentukan kelembagaan partisipatif dan mandiri sekaligus kelemahan kemandirian kelompok karena kemampuan dalam bargaining yang belum teruji. Sertifikasi tenaga swadaya serta penguatan komunitas dan kelembagaan sepatutnya merespon tersedianya kemampuan swadaya petani di desa (Suprastayasa dkk, 2022). Penggunaan teknologi dapat menghasilkan petani yang mandiri serta meningkatkan efisiensi waktu kerja (Suherman dkk, 2023).

IV. KESIMPULAN

Aktor yang berperan dalam pengembangan sistem ketahanan pangan di Kabupaten Jeneponto adalah petani yang menjadi anggota kelompok tani, Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan pertanian, dan pedagang. Strategi yang perlu diterapkan dalam penguatan kelembagaan petani di Kabupaten Jeneponto untuk mendukung ketahanan pangan adalah memperbaiki administrasi dalam kelompok tani, meningkatkan partisipasi petani agar lebih aktif menghadiri kegiatan penyuluhan oleh penyuluh pertanian lapangan. Selain itu untuk

meningkatkan peran pemerintah dalam pendirian kelembagaan ekonomi petani, pembentukan penyuluh pertanian swadaya, meningkatkan peran kelompok tani dalam pemanfaatan teknologi modern untuk menambah nilai tambah produk yang dihasilkan, meningkatkan posisi tawar petani dalam tata niaga produk pertanian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan dana Hibah Penelitian Riset Muhammadiyah Batch VI tahun 2022. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus kelompok tani di Kecamatan Turatea dan penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Turatea.

VI. REFERENSI

- Agus, F., Andrade, J. F., Rattalino Edreira, J. I., Deng, N., Purwantomo, D. K. G., Agustiani, N., Aristya, V. E., Batubara, S. F., Herniwati, Hosang, E. Y., Krisnadi, L. Y., Makka, A., Samijan, Cenacchi, N., Wiebe, K., & Grassini, P. (2019). Yield gaps in intensive rice-maize cropping sequences in the humid tropics of Indonesia. *Field Crops Research*, 237, 12–22. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2019.04.006>.
- Aldillah, R. (2018). Strategi Pengembangan Agribisnis Jagung di Indonesia. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 15(1), 43. <https://doi.org/10.21082/akp.v15n1.2017.43-66>
- Anwarudin, O., Sumardjo, S., Satria, A., & Fatchiya, A. (2020). Proses dan pendekatan regenerasi petani melalui multistrategi di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian*, 39(2), 73-85.
- Aziza, T., N. 2019. Upaya Penguatan Kelembagaan Pangan. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA) Volume 3, Nomor 1 (2019): 204-217.*
- Babu, S. C., Manvatkar, R., & Kolavalli, S. (2016). Strengthening Capacity for Agribusiness Development and Management in Sub-Saharan Africa. *Africa Journal of Management*, 2(1), 1–30. <https://doi.org/10.1080/23322373.2015.1112714>
- Bachke, M. E. (2019). Do farmers’ organizations enhance the welfare of smallholders? Findings from the Mozambican national agricultural survey. *Food Policy*, 89. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2019.101792>
- Branca, G., Cacchiarelli, L., Haug, R., & Sorrentino, A. (2022). Promoting sustainable change of smallholders’ agriculture in Africa: Policy and institutional implications from a socio-economic cross-country comparative analysis. *Journal of Cleaner Production*, 358. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131949>
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Eastwood, C., Ayre, M., Nettle, R., & Dela Rue, B. (2019). Making sense in the cloud: Farm advisory services in a smart farming future. *NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences*, 90–91. <https://doi.org/10.1016/j.njas.2019.04.004>.
- Haug, R., Nchimbi-Msolla, S., Murage, A., Moeletsi, M., Magalasi, M., Mutimura, M., Hundessa, F., Cacchiarelli, L., & Westengen, O. T. (2021). From Policy Promises to

- Result through Innovation in African Agriculture? *World*, 2(2), 253–266. <https://doi.org/10.3390/world2020016>.
- Hermanto, Swastika, D. K. S. (2011). Penguatan Kelompok Tani: Langkah Awal Peningkatan Kesejahteraan Petani. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 9 No. 4, Desember 2011 : 371-390.
- Kelly, S., & Rurangwa, J. (2018). Strengthening Institutional Performance in Rwanda. *Performance Improvement*, 57(5), 31–37. <https://doi.org/10.1002/pfi.21782>
- Lestari, D. E. G. (2020). Peran Komunikasi dalam Proses Modernisasi Masyarakat Desa Pertanian. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 4(2), 150-156.
- Panekenan, D., Jumagit A., J., G, Pangemanan, A., P. (2017). Peran Kredit Perbankan pada Sektor Pertanian di Provinsi Sulawesi Utara. *Agri-Sosio Ekonomi Unsrat*, ISSN 19074298 , Volume 13 Nomor 1 A, Januari 2017 : 183-194
- Prager, K. (2022). Implementing policy interventions to support farmer cooperation for environmental benefits. *Land Use Policy*, 119. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106182>
- Prasetyo, E., Ekowati, T. (2013). Kelembagaan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Untuk Mendukung Pengembangan Agribisnis Pangan.
- Ruhimat, I., S. (2015). Status Keberlanjutan Usahatani Agroforestry Pada Lahan Masyarakat: Studi Kasus di Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan* Vol. 12 No. 2 Juni 2015, Hal. 99-110.
- Rustandi, A., A, Harniaty, Kusnadi. (2020). Strategi Peningkatan Kapasitas Petani dalam Komunitas Usahatani Jagung (*Zea mays L*) di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut. *Jurnal Inovasi Penelitian* Vol. 1 No.3 Agustus 2020 : 589-597.
- Sadono, D. (2008). Pemberdayaan petani: paradigma baru penyuluhan pertanian di Indonesia. *Jurnal penyuluhan*, 4(1).
- Suherman, Patahuddin, Syawal, Nasrullah, A., Nurhapsa, Rahim, I., Sukmawati, Asli, R. F., & Ardyansyah, E. (2023). Diseminasi teknologi alat tabur pupuk sederhana bagi petani di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 7(1), 9-18.
- Suprastayasa, I. G. N. A., Adyatma, P., & Tirtawati, N. M. (2022). Desa Wisata Membangun Desa Dengan Pariwisata.
- Tan, R., Hu, R., & Vatn, A. (2021). What does sustainability demand? An institutionalist analysis with applications to China. *Journal of Chinese Governance*, 6(4), 486–514. <https://doi.org/10.1080/23812346.2021.1940690>
- Winarta, I. W. T., Raka, A. A. G., & Sumada, I. M. (2020). Evaluasi kebijakan penyaluran dana bantuan sosial di pemerintah kabupaten ganyar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 28-42.
- Yu, J., & Wu, J. (2018). The sustainability of agricultural development in China: The agriculture-environment nexus. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 10, Issue 6). MDPI. <https://doi.org/10.3390/su10061776>.